

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi/Kab/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah memberikan pelayanan dan memfasilitasi semua kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam mewujudkan

Pembangunan Propinsi Jawa Tengah. Berkaitan dengan pemberian pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh Pegawai dan Sarana Prasarana yang memadai, disamping adanya kebijakan dari Gubernur dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan setiap kegiatan, dimana acuan dan pedoman tersebut telah dituangkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam **Visi** dan **Misi** Organisasi.

## **B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **1. UMUM.**

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi berwenang mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kewenangan Provinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan daerah otonom yang mempunyai kesamaan dengan daerah kabupaten/kota. Sehingga kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang luas dan bertanggungjawab.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah memberikan pelayanan dan memfasilitasi semua kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam

mewujudkan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah. Berkaitan dengan pemberian pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh Pegawai dan Sarana Prasarana yang memadai, disamping adanya kebijakan dari Gubernur dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan setiap kegiatan, dimana acuan dan pedoman tersebut telah dituangkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam **Visi** dan **Misi** Organisasi. Berkaitan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran maka berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2015 sebagai perwujudan Sistem Akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis ( RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasdi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini selain untuk menginformasikan mengenai proses dan hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga menjelaskan tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, selanjutnya diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan bahan perbaikan system dan penyelenggaraan manajemen kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dimasa mendatang

## **2. STRUKTUR ORGANISASI.**

Keberadaan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah berdasar pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11). Secara karakteristik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah Sub Sistem dari system Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan kedudukan dan fungsi yang spesifik, karena disatu sisi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sementara

disisi lain secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Gubernur pembinaannya diserahkan kepada Sekretaris Daerah, bahkan didalam melaksanakan tugasnya berdasar kepada kewenangan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Berdasarkan Perda Propinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2006 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2006, Struktur Organisasi terdiri dari 1 Sekwan, 5 Bagian, 12 Sub bagian. Sedangkan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11), menjadi ; 1 Sekretaris Dewan, 4 Bagian dan 12 Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
- b. Bagian Umum, membawahi;
  1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Rumah Tangga;
  3. Sub Bagian Perlengkapan

- c. Bagian Keuangan, membawahi:
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
  - 2. Sub Bagian Pembayaran / Perbendaharaan;
  - 3. Sub Bagian Akuntansi/Verifikasi;
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, membawahi:
  - 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
  - 2. Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan;
  - 3. Sub Bagian Perundang-undangan;
- e. Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengkajian, membawahi:
  - 1. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
  - 2. Sub Bagian Protokol dan Publikasi;
  - 3. Sub Bagian Pengkajian;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun kedudukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah. Masing-masing bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.

### **3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.**

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008 pasal 10 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11) **TERLAMPIR**, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai Tugas Pokok ;

- a. Sekretaris** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris Dewan mempunyai tugas sebagaimana tersebut dibawah ini ;
  1. Menyelenggaraan administrasi kesekretariatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Menyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
4. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

**b. Bagian Umum** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan dan pelayanan administrasi di bidang tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Dewan menyiapkan rencana dan program, pelaporan, sistem informasi, evaluasi dan pelaporan bidang Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta pelaksanaan dan fasilitasi administrasi umum dan kepegawaian, pelaksanaan dan fasilitasi urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Umum mempunyai fungsi:

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan/fasilitasi administrasi di bidang tata usaha dan kepegawaian;



2. Penyiapan bahan pelaksanaan dan Pelayanan/fasilitasi administrasi di bidang rumah tangga;
3. Penyiapan bahan dan pelayanan/fasilitasi administrasi di bidang perlengkapan;
4. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang Kesekretariatan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian di Bawah Bagian Umum;**

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan/fasilitasi administrasi di bidang, tata usaha dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, pengelolaan sistem informasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan/fasilitasi administrasi di bidang rumah tangga, meliputi: pelaksanaan dan pelayanan teknis penyelenggaraan rapat, pemeliharaan, perawatan gedung dan kantor, poliklinik, dan keamanan lingkungan gedung dan kantor;

3. Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dan pelayanan/fasilitasi administrasi di bidang perlengkapan, meliputi: analisis kebutuhan dan pengadaan, inventarisasi, perlengkapan, pemeliharaan kendaraan dinas.

**c. Bagian Keuangan** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan anggaran, akuntansi, dan perbendaharaan pembayaran, pembukuan dan verifikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan anggaran;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang akuntansi, pembukuan dan verifikasi;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan dan fasilitasi pelayanan teknis bidang perbendaharaan;
4. Penyiapan bahan pelaporan bidang Keuangan;
5. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian di Bawah Bagian Keuangan :**

1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan fasilitasi administrasi di bidang pertencanaan dan anggaran, meliputi: penyusunan dan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
2. Sub Bagian Akuntansi/Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang akuntansi meliputi: pengendalian keuangan, verifikasi dan pembukuan keuangan dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Sub Bagian Perbendaharaan/Pembayaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang perbendaharaan, meliputi: pembyaran keuangan pegawai, anggota dan pimpinan DPRD dan kegiatan operasional Sekretaris Dewan.

- d. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang rapat dan risalah, komisi dan kepanitiaan dan perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah

Provinsi Jawa Tengah, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai fungsi ;

1. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang rapat dan risalah;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang komisi dan kepanitiaan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang penyusunan perundang-undangan;
4. Penyiapan bahan dan fasilitasi administrasi bidang Rapat, Risalah serta Komisi dan Kepanitiaan , dan Perundang-Undangan;
5. Penyiapan bahan dan fasilitasi teknis bidang Rapat, Risalah serta Komisi dan Kepanitiaan , dan Perundang-undangan;
6. Penyiapan bahan pelaporan bidang Persidangan dan Risalah;
7. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian di Bawah Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;**

1. Sub Bagian Rapat dan Risalah, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang rapat dan risalah meliputi: persiapan pelaksanaan rapat-rapat dan penyusunan

risalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang komisi dan kepanitian meliputi: penyelenggaraan dan penyusunan risalah rapat komisi dan kepanitian, pelayanan kunjungan kerja sidang lapangan;
3. Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang penyusunan perundang-undangan, meliputi: menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan menyusun rancangan keputusan Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan rancangan Peraturan Daerah.

**e. Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengkajian,** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang humas dan publikasi, protokol dan aspirasi, pengkajian dan pengembangan dan teknis pemberitaan kegiatan Dewan dan penyampaian aspirasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Humas dan Pengkajian mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang humas dan publikasi;

2. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang protokol dan aspirasi;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang pengkajian dan pengembangan; Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan teknis kepada masyarakat;
4. Menyiapkan bahan pelaporan bidang Kehumasan , Protokol dan Pengkajian;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian dibawah Bagian Humas dan Pengkajian;**

1. Sub Bagian Humas dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang humas dan publikasi, meliputi: pelaksanaan kegiatan kehumasan, hubungan antar lembaga dan publikasi;
2. Sub Bagian Protokol dan Aspirasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang protokol dan aspirasi, meliputi: menyiapkan pelayanan kegiatan keprotokolan dan penyerapan aspirasi masyarakat.
3. Sub Bagian Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang pengkajian dan pengembangan, meliputi: menyiapkan pelaksanaan

pengkajian terhadap produk hukum, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli serta penyelenggaraan perpustakaan.

**f. Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatas ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
3. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN SAPRAS.**

Lingkungan Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudnya sistem administrasi pemerintahan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, merupakan salah satu indikator yang dipergunakan untuk keberhasilan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya. Gambaran umum tersebut, salah satunya adalah dukungan dari Sumber Daya Aparatur ( personil ) dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Sarana prasarana dengan rincian sebagai berikut :

**a. Susunan Kepegawaian.**

Dalam melaksanakan kebijakan program dan kegiatan, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh 174 orang Pegawai Negeri Sipil dan 14 Pegawai Harian Lepas yang kesemuanya berjumlah 188 ( Seratus delapan puluh delapan ) orang dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Berdasarkan Golongan / Pangkat.
- Berdasarkan Jabatan.
- Berdasarkan Pendidikan.

Dengan perincian sebagaimana tertuang dalam uraian berikut ini ; Tabel I.B.1

Jumlah Karyawan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan/Pangkat

| <b>No</b> | <b>Uraian</b>          | <b>Posisi Per<br/>1 JANUARI 2014</b> |              |
|-----------|------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1         | Golongan IV (Pembina)  | 13                                   | Orang        |
| 2         | Golongan III (Penata)  | 85                                   | Orang        |
| 3         | Golongan II (Pengatur) | 68                                   | Orang        |
| 4         | Golongan I (Juru)      | 8                                    | Orang        |
|           | <b>TOTAL</b>           | <b>174</b>                           | <b>Orang</b> |



Tabel I.B.2  
 Jumlah Karyawan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa  
 Tengah Berdasarkan Jabatan

| No | Uraian             | Posisi Per<br>1 JANUARI 2014 |              |
|----|--------------------|------------------------------|--------------|
| 1. | Pejabat Struktural |                              |              |
|    | - Eselon I         | -                            |              |
|    | - Eselon II. A     | 1                            |              |
|    | - Eselon II. B     | -                            |              |
|    | - Eselon III.A     | 4                            | Orang        |
|    | - Eselon III. B    | -                            |              |
|    | - Eselon IV. A     | 12                           | Orang        |
|    | - Eselon IV. B     | -                            |              |
| 2. | Pejabat Fungsional |                              |              |
|    | - Para Medis       | 1                            | Orang        |
|    | - Pustakawan       | -                            | Orang        |
| 3. | Staf               | 156                          | Orang        |
|    | <b>JUMLAH</b>      | <b>174</b>                   | <b>Orang</b> |

Tabel I.B.3  
 Jumlah Karyawan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa  
 Tengah Berdasarkan Pendidikan

| No | Uraian            | Posisi Per<br>1 JANUARI 2014 |              |
|----|-------------------|------------------------------|--------------|
| 1. | S3                | -                            | Orang        |
| 2. | S2                | 21                           | Orang        |
| 3. | S1                | 58                           | Orang        |
| 4. | D4                | 1                            | Orang        |
| 5. | Sarjana Muda (D3) | 6                            | Orang        |
| 6. | D1                | -                            | Orang        |
| 7. | SLTA              | 72                           | Orang        |
| 8. | SLTP              | 6                            | Orang        |
| 9. | SD                | 11                           | Orang        |
|    | <b>JUMLAH</b>     | <b>174</b>                   | <b>Orang</b> |

Tabel I.B.4

Jumlah Pegawai Harian Lepas Pada Sekretariat DPRD  
Provinsi Jawa Tengah

| No | Uraian            | Posisi Per<br>1 JANUARI 2014 |              |
|----|-------------------|------------------------------|--------------|
| 1. | S1                | 1                            | Orang        |
| 2. | Sarjana Muda (D3) | 2                            | Orang        |
| 3. | D1                | 1                            | Orang        |
| 3. | SLTA              | 6                            | Orang        |
| 4. | SLTP              | 2                            | Orang        |
| 5. | SD                | 2                            | Orang        |
|    | <b>JUMLAH</b>     | <b>14</b>                    | <b>Orang</b> |

**b. Sarana dan Prasarana :**

Dukungan sarana dan prasarana yang ada pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

1. Berupa gedung, rumah dinas, wisma dan pool kendaraan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kendaraan Operasional
3. Perlengkapan kantor.
4. Berupa dana.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2015 mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan terdiri dari :

1. Pendapatan Rp. 1.100.000.000,-
2. Jumlah Belanja Rp. 112.636.197.000,-

Terdiri dari :

- |                        |     |                  |
|------------------------|-----|------------------|
| Belanja tidak langsung | Rp. | 22.295.214.000,- |
| Belanja langsung       | Rp. | 90.340.983.000,- |

### **C. ASPEK STRATEGIS / ISSU STRATEGIS**

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga atau instansi Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam 5 tahun ke depan (2013-2018).

#### **C.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Secara normatif, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, disamping menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, antara lain :

- a. Belum optimalnya peran Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang disebabkan belum berjalannya peran dan fungsi DPRD, partai politik dan ormas dalam melaksanakan peran dan fungsi politik.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman Kabupaten/Kota terhadap seperangkat peraturan tentang otonomi daerah.
- c. Belum optimalnya kerjasama daerah antara lain disebabkan kemampuan aparatur pemerintah yang di daerah belum profesional, peraturan daerah tersebut belum sinkron dalam mendukung kerjasama daerah.
- d. Belum sinerginya dan sinkronnya regulasi/peraturan pengelolaan keuangan daerah dan kadang-kadang berubah-ubah yang mengakibatkan multitafsir sehingga menimbulkan kesulitan dalam mengimplementasikan dan optimalisasikan tertib administrasi keuangan daerah.
- e. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kegiatan pelayanan dan administrasi ketatausahaan.

- f. Belum terintegrasinya sistem informasi ketatausahaan dengan sistem informasi kepegawaian.
- g. Masih minimnya saran dan prasarana pendukung keamanan lingkungan gedung dan kantor.
- h. Masih minimnya peralatan/tehnologi yang menunjang inventarisasi aset barang milik daerah.
- i. Belum optimalnya inventarisasi aset daerah, serta penggunaan dan pemanfaatan aset daerah yang disebabkan masih minimnya peralatan/teknologi yang dapat menunjang manajemen aset daerah.
- j. Belum optimalnya Website yang dimiliki Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu sarana informasi dan pelayanan terhadap masyarakat.
- k. Belum optimalnya pemetaan kebutuhan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang akurat.
- l. Kurang memadainya Pool/Garasi sebagai salah satu faktor pemeliharaan kendaraan dinas menjadi kurang optimal.
- m. Masih kurangnya regulasi (juklak, juknis, SOP, SPM, dll) yang mengatur pelaksanaan kegiatan Pelayanan di Sekretariat DPRD.
- n. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Sekretariat DPRD.
- o. Belum berkembangnya jejaring kerjasama pengembangan pelayanan yang efektif.

- p. Belum seluruhnya SDM Sekretariat DPRD mempunyai kompetensi yang cukup dalam hal Pelayanan yang prima.

## **C.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Tengah serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat maka visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 adalah :

### **PROGRAM UNGGULAN:**

1. Meningkatkan dan memperluas pendidikan politik masyarakat untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Melaksanakan reformasi birokrasi berbasis kompetensi.
3. Memperkuat sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparan dan terintegrasi.
4. Mewujudkan desa mandiri.
5. Meningkatkan kesejahteraan buruh.
6. Rakyat sehat.
7. Optimalisasi fasilitas penyelenggaraan pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peningkatan Keadilan Gender.
9. Infrastruktur dan sarana transportasi.
10. Ijo royo-royo.
11. Peningkatan fungsi dan peran seni budaya Jawa.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya,

maka Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan visi dan misi Gubernur, Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima.

Tujuan dan Sasaran dari Misi ini adalah :

- 1) Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima;
- 2) Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel;
- 3) Melaksanakan penegakan hukum.
- 4) Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan provinsi;
- 5) Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta sistem pola karier yang jelas;
- 6) Meningkatnya cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 8) Terwujudnya tertib administrasi kependudukan;
- 9) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



- 10) Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
- 11) Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 12) Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam upaya turut mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tersebut, tentunya Sekretariat DPRD perlu untuk menyusun suatu visi dan misi yang sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan melalui tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai SKPD yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pelayanan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **C.3 Telaah Renstra K/L Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah**

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun global permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa dampak informasi, fleksibilitas yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses untuk meningkatkan kapasitas dan kuantitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

- a. Mewujudkan produk hukum daerah yang mendorong pencapaian akuntabilitas kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang mendukung penyelenggaraan otonomi daerah pelaksanaan otonomi daerah.
- d. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat.
- e. Meningkatkan kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat dan Luar Negeri
- f. Meningkatkan Sinkronisasi pelaksanaan administrasi keuangan, meningkatnya tertib administrasi keuangan daerah dalam pengefektifan sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah, Meningkatkan kapasitas Birokrasi dan Profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang efektif, efisien, responsif transparan dan akuntabel serta meningkatkan PAD dan sumber pendapatan lainnya.
- g. Meningkatkan pengelolaan, pendayagunaan dan pengamanan aset daerah
- h. Meningkatkan sistem pengawasan intenal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah

Demokrasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya pembebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya

sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagi sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climax change). Ketegangan lintas batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut, peran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sangat strategis karena merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dituntut memiliki kemampuan dan menjembatani kesenjangan serta menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat UUD 1995 yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan makm

#### **C.4 Telaah Rencana Tata Ruang, Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah

arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 1 angka 10). Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2 ).

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif. Dalam penyusunan perencanaan perlu sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu terus dilakukan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Jawa Tengah dengan memformulasikan tujuan penataan

ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan penataan ruang yang mendukung Provinsi Jawa Tengah menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Ruang lingkup Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah mencakup :

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi.
- b. Rencana struktur ruang wilayah provinsi.
- c. Rencana pola ruang wilayah provinsi.
- d. Penetapan kawasan strategi provinsi.
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan
- f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.” Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang wajib melaksanakan KLHS sesuai dengan UU PPLH pasal 15 ayat 2 huruf b adalah “Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.”

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan telah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan/ resiko lingkungan hidup sebagai

mana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Renstra Sekretariat DPRD dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Program kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD diarahkan pada pengembangan SDM yang sejalan dengan muatan KLHS.

### **C.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dampak luasnya yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya bangkit terhadap janji politik yang perlu diwujudkan. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya peran Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang disebabkan belum berjalannya peran dan

- fungsi DPRD, partai politik dan ormas dalam melaksanakan peran dan fungsi politik.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman Kabupaten/Kota terhadap seperangkat peraturan tentang otonomi daerah.
  - c. Belum optimalnya kerjasama daerah antara lain disebabkan kemampuan aparatur pemerintah yang di daerah belum profesional, peraturan daerah tersebut belum sinkron dalam mendukung kerjasama daerah.
  - d. Belum sinerginya dan sinkronnya regulasi/peraturan pengelolaan keuangan daerah dan kadang-kadang berubah-ubah yang mengakibatkan multitafsir sehingga menimbulkan kesulitan dalam mengimplemetasikan dan optimalisasikan tertib administrasi keuangan daerah.
  - e. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kegiatan pelayanan dan administrasi ketatausahaan.
  - f. Belum terintegrasinya sistem informasi ketatausahaan dengan sistem informasi kepegawaian.
  - g. Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung keamanan lingkungan gedung dan kantor.
  - h. Masih minimnya peralatan/tehnologi yang menunjang inventarisasi aset barang milik daerah.
  - i. Belum optimalnya inventarisasi aset daerah, serta penggunaan dan pemanfaatan aset daerah yang

disebabkan masih minimnya peralatan/teknologi yang dapat menunjang manajemen aset daerah.

- j. Belum optimalnya website yang dimiliki Sekretariat DPRD sebagai salah satu sarana informasi dan pelayanan terhadap masyarakat.
- k. Belum optimalnya pemetaan kebutuhan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang akurat.
- l. Kurang memadainya Pool/Garasi sebagai salah satu faktor pemeliharaan kendaraan dinas menjadi kurang optimal.
- m. Masih kurangnya regulasi (juklak, juknis, SOP, SPM, dll) yang mengatur pelaksanaan kegiatan Pelayanan di Sekretariat DPRD.
- n. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Sekretariat DPRD.
- o. Belum berkembangnya jejaring kerjasama pengembangan pelayanan yang efektif.
- p. Belum seluruhnya SDM Sekretariat DPRD mempunyai kompetensi yang cukup dalam Pelayanan yang prima.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lkj IP ) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian



kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Dengan pola pikir seperti itu, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dapat diilustrasikan dengan sistematika sebagai berikut:

## **Kata Pengantar,**

## **Ikhtisar Eksekutif,**

### **BAB I.**

*Pendahuluan*, pada bab ini dijelaskan latar belakang penulisan laporan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, aspek strategis/issu Strategis serta sistematika penulisan laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj. IP ) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### **BAB II.**

*Perencanaan Kinerja*, dijelaskankan mengenai RPJMD Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 , Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 serta Perjanjianj Kinerja tahun 2015. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terdapat dalam Renstra

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 - 2018.

### **BAB III.**

*Akuntabilitas Kinerja*, diuraikan Capaian kinerja Organisasi Tahun 2015, analisa Capaian Kinerja evaluasi dan analisis akuntabilitas keuangan, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasi yang akan diambil.

### **BAB IV.**

*Penutup*, mengemukakan kesimpulan secara umum keberhasilan atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta saran yang diperlukan.

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan perencanaan strategis, dijabarkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk lima tahun yaitu sejak tahun 2013 s/d 2018. Perencanaan kinerja merupakan tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan perencanaan kinerja dilakukan pada setiap awal tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Pada tahun 2015 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah bermaksud memfokuskan pencapaian sasaran yaitu:

- a. Tertatanya kehidupan baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik di daerah yang kapable, kredible dan memiliki kepekaan yang tinggi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepemimpinan rakyat di daerah.
- b. Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan transparan dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat disegala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh karena itu perlu adanya program penguatan keadaran politik masyarakat dalam kehidupan berdemokratis.
- c. Terbangunnya budaya politik yang berlandaskan pada etika politik dan moralitas yang menunjang tinggi adanya perbedaan kebenaran dan keadilan.

- d. Terbangunnya dinamika dan iklim politik di daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Adapun komponen-komponen Perencanaan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah seperti tersebut dibawah ini :

#### A. RPJMD Tahun 2013 -2018

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima Tahun adalah sebagai berikut:

| NO | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Sasaran  | Satuan | Kondisi awal (2013) | Target akhir 2018 |
|----|---|--|--------|---------------------|-------------------|
| 1  | Terfasilitasinya Penyusunan Raperda, Raperda Inisiatif serta Peraturan DPRD Prov. Jateng  | Semakin Tercapainya Prosentasi Prolegda Yang Terselasaikan   | buah   | 100                 | 100               |
| 2  | Terfasilitasinya Kegiatan Penyiapan Pengkajian dan penelahaan peraturan Perundang Undangan  | Semakin meningkatnya kapasitas hukum dimasyarakat dengan pembahasan penyiapan, pengkajian dan penalahan peraturan Perundang-undangan | kali   | 100                 | 100               |
| 3  | Koordinasi dan komunikasi, delegasi dan konsultasi serta kunjungan kerja dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD Provinsi Jawa Tengah. | Semakin meningkatnya Penyerapan aspirasi melalui Kunjungan Kerja DPRD di dalam dan Luar Provinsi Jawa Tengah                         | kali   | 100                 | 100               |

|   |   |  |          |     |     |
|---|---|--|----------|-----|-----|
| 4 | Koordinasi dan komunikasi, delegasi dan konsultasi serta kunjungan kerja dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD Provinsi Jawa Tengah. | Semakin terserapnya aspirasi dari Masyarakat atau Konstituen melalui Pelaksanaan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah   | kegiatan | 100 | 100 |
| 5 | Terfasilitasi Kualitas Kegiatan DPRD dalam kegiatan Ekspose Interaktif Dewan Melalui Media Elektronik dan Media Cetak                       | Semakin tercapainya informasi masyarakat tentang Kebijakan dan Kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Ekspose Interaktif Dewan Melalui Media Elektronik dan Media Cetak | kegiatan | 100 | 100 |
| 6 | Terfasilitasinya Hearing / Dialog Dan Koordinasi serta permintaan informasi Dengan Stakeholder Dan Terjalannya Kemitraan                    | Semakin tercapainya permintaan informasi tentang Kebijakan dan Kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah   | Kali     | 100 | 100 |
| 7 | Terfasilitasi kegiatan Seminar DPRD Provinsi Jawa Tengah  | Semakin tercapainya peningkatan pengetahuan dan SDM DPRD Provinsi Jawa Tengah  | Kali     | 100 | 100 |
| 8 | Terfasilitasinya liputan Pimpinan, Komisi dan Kedewanan   | Semakin terpublikasinya kegiatan Pimp dan Angg. DPRD melalui publikasi audio Visual ( foto, rekam gambar, rekam berita )   | bl       | 100 | 100 |

|   |   |   |          |     |     |
|---|---|---|----------|-----|-----|
| 9 | Terfasilitasi kegiatan sosialisasi dan uji publik | Semakinn terciptanya pola hub. Yg sinergi antara DPRD dan steakholder | kegiatan | 100 | 100 |
|---|---|---|----------|-----|-----|

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategis, kebijakan program dan kegiatan.

## B. RENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2013 - 2018

Perencanaan strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Perencanaan Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2013 s/d 2018. Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan **Visi** dan **Misi** yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu :

## 1. Pernyataan Visi

**Visi** berkaitan dengan pandangan jauh ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipasif, inovatif serta produktif (LAN-RI 2003:7). Dengan demikian visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Dalam konteks ini untuk tercapainya peningkatan mutu/produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka telah ditetapkan visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 telah dipilih pendekatan implementasi (implementation approach) dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Tengah serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat maka ***Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 adalah*** “ **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI** ” Dan Maksud dari Visi tersebut adalah sebagai berikut :

### **Sejahtera :**

- Terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

- Terciptanya hubungan antar masyarakat : Saling menghargai, inklusif, saling bantu, tepo sliro, dan gotong royong.
- Tersedianya sarana dan prasarana publik, infrastuktur fisik dan non fisik yang nyaman dan memadai, suprastruktur yang mampu menampung aspirasi, menyelesaikan problem dan mendorong kemajuan masyarakatnya, sarana transportasi publik yang nyaman, murah, dan mudah dijangkau.

**Berdikari :**

- Berdaulat dalam mengambil keputusan dan menentukan arah pembangunan Jawa Tengah dalam koridor NKRI.
- Mandiri dalam mengeksplorasi, mengolah dan mengembangkan SDA, SDM, kearifan lokal, ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa mengisolasi diri.
- Berkepribadian dalam membangun identitas Jawa Tengah yang tepo sliro, tidak menindas, tidak ABS dan inklusif dalam pergaulan nasional maupun internasional.

**Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi :**

- Sikap dalam perilaku kerja bagi perilaku pembangunan di Jawa Tengah agar tidak korupsi, kolusi dan nepotisme, bekerja berdasarkan kompetensi, obyektifitas dan transparansi, menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan hormono, tanpa ego sektoral dan berorientasi pada outcome.



- Pelaku pembangunan di Jawa tengah adalah pemerintah disemua tingkatan dan level, tokoh masyarakat, pakar, profesional, pelaku bisnis, aktivis orgam, organisasi rakyat, LSM, dan lain-lain yang mendukung pencapaian Visi Misi dan program Ganjar – Heru. Adapun ***visi yang akan dicapai oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah "Mewujudkan Sekretariat yang berkemampuan untuk mendukung kinerja dalam melaksanakan tugas serta fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang aspiratif, transparansi dan akuntable"***. Visi tersebut mengandung makna dalam melangkah kemasa depan dengan suatu sikap untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan.

## **2. Pernyataan Misi**

**Misi** merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Guna Mewujudkan visi tersebut terdapat misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

**7 ( tujuh ) Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :**

Misi satu :           Membangun Jateng berbasis Trisakti Bung Karno     berdaulat di bidang politik, berdikari

di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

- Misi dua : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
- Misi tiga : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparansi, "Mboten korupsi, Mboten ngapusi".
- Misi empat : Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.
- Misi lima : Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkup hajat hidup orang banyak.
- Misi enam : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
- Misitujuh : Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat

mengetahui peran dan program-program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta hasil yang akan diperoleh di masa datang.

Adapun yang menjadi ***misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah :***

- a. Meningkatkan kinerja dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Memfasilitasi secara administrasi dalam pelaksanaan tupoksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Memfasilitasi kerjasama Anggota Dewan dengan stakeholder.
- d. Mendukung fungsi Dewan dalam mewujudkan kemitraan dengan eksekutif.
- e. Memfasilitasi administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tupoksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **3. Tujuan.**

Tujuan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan, dan agar usaha dalam upaya pencapaian visi dan misi dapat lebih terorganisir serta terdapat alur yang jelas antara kegiatan dengan visi dan misi

yang harus dicapai organisasi. Tujuan akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam beberapa tahun mendatang.

Dengan tujuan ini maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat mengetahui apa yang harus dilakukan sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta arah kebijakan yang akan diambil dalam rangka membantu kegiatan Dewan.

Sesuai dengan misinya maka tujuan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, mewujudkan profesionalisme aparatur dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan cara:

- a. Meningkatkan profesionalisme aparatur dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
- b. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Mengembangkan rasa kebersamaan didalam kelembagaan.
- d. Memberikan pelayanan administratif secara maksimal kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- e. Memfasilitasi dan koordinasi antara pihak Legislatif dan Eksekutif.

Dengan kata lain ***”Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan kelembagaan agar memiliki kemampuan dalam jangka panjang untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan dalam jangka pendek melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”***.

Program yang akan dilakukan untuk mendukung strategi dalam mencapai tujuan pembangunan aparatur pemerintah daerah adalah :

- a. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- b. Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah daerah.
- c. Peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintah.

#### **4. Sasaran**

Pada tahun ini Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang hendak dicapai dalam mewujudkan kualitas kehidupan demokrasi di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

- a. Tertatanya kehidupan baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik di daerah yang kapable, kredible dan memiliki kepekaan yang tinggi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepemimpinan rakyat di daerah.
- b. Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan transparan dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat

disegala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh karena itu perlu adanya program penguatan keadaran politik masyarakat dalam kehidupan berdemokratis.

- c. Terbangunnya budaya politik yang berlandaskan pada etika politik dan moralitas yang menunjang tinggi adanya perbedaan kebenaran dan keadilan.
- d. Terbangunnya dinamika dan iklim politik di daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam rangka pencapaian sasaran maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, mewujudkan dalam 4 Program Pendukung dan 1 Program Utama/Prioritas dengan 37 kegiatannya.

Program Utama/Prioritas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari 9 kegiatan :
  - Kegiatan Penyusunan Pembahasan Raperda dan Raperda Inisiatif serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
  - Kegiatan Penyiapan, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Perundang-undangan.
  - Kegiatan Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
  - Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- Kegiatan Dialog Interaktif Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Komisi, Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui media massa.
- Kegiatan Penerbitan Majalah Mimbar
- Seminar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Kegiatan Liputan Pimpinan, Komisi dan Kedewanan.
- Kegiatan Sosialisasi dan Uji Publik.

Program Pendukung ada 4 yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari **15 kegiatan** Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan perkantoran.
- Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah.
- Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan kantor / Rumah Dinas.
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

- Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
  - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
  - Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi didalam dan Luar Daerah.
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran.
  - Kegiatan Penyediaan Sarana Kesehatan.
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan/Premi Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terdiri dari **11 kegiatan** Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
  - Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
  - Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas.
  - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
  - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
  - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.



- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair.
  - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga.
  - Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip.
  - Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan.
  - Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , yang terdiri dari **1 kegiatan** Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , yang terdiri dari **1 kegiatan** Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

### **C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015**

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat disetiap instansi pemerintah. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan

penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat.

Kriteria keberhasilan perjanjian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan capaian keluaran indikator kinerja output yang telah ditetapkan. Sedangkan ukuran keberhasilan penetapan kinerja ditunjukkan dengan capaian hasil indikator outcome yang telah ditetapkan pada awal tahun 2015.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2015 telah ditetapkan pada awal tahun anggaran sebanyak 1 Program utama dan 4 Program pendukung terdiri dari 37 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 112.636.197.000,-

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Provinsi  
Jawa Tengah

| No   | Sasaran Strategis                                       | Indikator kinerja  | Target  |
|--|---|--|---|
| 1  | 2   | 3  | 4   |
| 1. Meningkatkan pelayanan untuk menunjang kinerja DPRD   | Meningkatnya kinerja DPRD                               | 1) Jumlah Raperda dan Peraturan ditetapkan<br>2) Jumlah kunker DPRD<br>3) Jumlah kegiatan penyerapan aspirasi Masyarakat( reses)<br>4) Jumlah kgiatan dialog interaktif Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Komisi, Fraksi DPRD Provinsi Jawa tengah melalui media massa<br>5) Jumlah liputan kegiatan Pimpinan, komisi dan kedewanan | 19 Perda, 2 Perat. DPRD, 28 Kep. DPRD<br>98 Kali kegiatan dalam 9 bln<br>3 kali kegiatan<br>4 kali kegiatan<br>98 kali kegiatan |
| 2. Meningkatkan koordinasi antara pihak eksekutif dengan legislatif dan meningkatkan kualitas dan publikasi produk hukum | Meningkatnya pengkajian dan publikasi produk hukum DPRD | 6) Jumlah kegiatan seminar<br>7) Jumlah kegiatan pengkajian dan penelaahan peraturan perundang-undangan<br>8) Jumlah penerbitan majalah mimbar<br>9) Jumlah sosialisasi dan uji publik kebijakan dan kinerja DPRD  | 6 kali kegiatan<br>7 kali kegiatan<br>9 kali edisi<br>10 kali kegiatan  |

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai hasil dari proses penilaian yang terencana dan sistematis berdasarkan kelompok indikator input, output maupun outcome untuk mengukur kehematan, efisiensi, efektifitas dan kualitas pencapaian sasaran.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokresi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel III.A.1

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

| No | Interval Nilai Realisasi kinerja | Kriteria penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | $91 \leq 100$                    | Sangat baik                          |
| 2. | $76 \leq 90$                     | Tinggi                               |
| 3. | $66 \leq 75$                     | Sedang                               |
| 4. | $51 \leq 65$                     | Rendah                               |
| 5. | $\leq 50$                        | Sangat Rendah                        |

❖ Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

**Tabel III.A.2 Capaian Kinerja Tahun 2015**

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Satuan   | Target pk  | Realisasi   | Persentase | Kriteria           |
|----|---|--|----------|--|---|------------|--------------------|
| 1  | Terfasilitasinya Penyusunan Raperda, Raperda Inisiatif serta Peraturan DPRD Prov. Jateng  | Semakin Tercapainya Prosentasi Prolegda Yang terselesaikan   | buah     | 19 Perda, 2 Perat. DPRD, 28 Kep. DPRD                      | 10 Perda, 43 Keputusan DPRD   | 73,68      | <b>Sedang</b>      |
| 2  | Terfasilitasinya Kegiatan Penyiapan Pengkajian dan penelahaan peraturan Perundang Undangan  | Semakin meningkatnya kapasitas hukum dimasyarakat, pengkajian dan penalahaan peraturan Perundang-undangan        | kali     | 10 pengkajian peraturan per-UU-an dan 1 pendidikan politik | 9 kali kegiatan   | 90,00      | <b>Tinggi</b>      |
| 3  | Terfasilitasi Koordinasi dan komunikasi, delegasi dan konsultasi serta kunjungan kerja dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD Provinsi Jawa Tengah. | Semakin meningkatnya Penyerapan aspirasi melalui Kunjungan Kerja DPRD di dalam dan Luar Provinsi Jawa Tengah     | kali     | 134 kegiatan dalam 12 bulan                                | 84 Kali Kunker Dalam Daerah, 6 Kali kunker luar daerah, 1 kali kunker luar negeri | 97,00      | <b>Sangat baik</b> |
| 4  | Terfasilitasi Koordinasi dan komunikasi, kegiatan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah.  | Semakin terserapnya aspirasi dari Masyarakat atau Konstituen melalui Pelaksanaan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah | Kegiatan | 3 kegiatan   | 3 kegiatan  | 100,00     | <b>Sangat Baik</b> |

|   |  |  |           |  |                                |        |                    |
|---|--|--|-----------|--|--------------------------------|--------|--------------------|
| 5 | Terfasilitasi Kualitas Kegiatan DPRD dalam kegiatan Ekspose Interaktif Dewan Melalui Media Elektronik dan Media Cetak    | Semakin tercapainya informasi masyarakat tentang Kebijakan dan Kinerja DPRD melalui Media Elektronik dan Media Cetak     | kegiatan  | 4 kegiatan                                     | 4 kegiatan                     | 100,00 | <b>Sangat Baik</b> |
| 6 | Terfasilitasinya Hearing / Dialog Dan Koordinasi serta permintaan informasi Dengan Stakeholder Dan Terjalannya Kemitraan | Semakin tercapainya permintaan informasi tentang Kebijakan dan Kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah                         | Kali      | 9 kali dan pengada-an warta legislatif On Line | 11 kali dan 3 warta legislatif | 100,00 | <b>Sangat baik</b> |
| 7 | Terfasilitasi kegiatan Seminar DPRD Provinsi Jawa Tengah   | Semakin tercapainya peningkatan pengetahuan dan SDM DPRD Provinsi Jawa Tengah  | kali      | 5 kali kegiatan                                | 5 kali kegiatan                | 80,00  | <b>Tinggi</b>      |
| 8 | Terfasilitasinya liputan Pimpinan, Komisi dan Kedewanan  | Semakin terpublikasinya kegiatan Pimp dan Angg. DPRD melalui publikasi audio Visual ( foto, rekam gambar, rekam berita ) | bln       | 12 bulan                                       | 12 bulan                       | 86,00  | <b>Tinggi</b>      |
| 9 | Terfasilitasi kegiatan sosialisasi dan uji publik  | Semakinn terciptanya pola hub. Yg sinergi antara DPRD dan steakholder  | Kegiat an | 6 kali kegiatan                                | 6 kali kegiatan                | 85,00  | <b>Tinggi</b>      |
|   |  | Rata-rata  |           |  |                                | 92.60  | <b>Sangat baik</b> |

Dari tabel diatas secara umum capaian indikator pada sasaran Program Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 9 kegiatan tidak sesuai target 100%. Untuk capaian kinerja realisasi fisik rata rata 92.60 %, sedikit dibawah target yang telah ditetapkan 100 %. Capaian kinerja pada sasaran Strategis III.A.2 rata-rata capaian kinerja tahun 2015 **apabila dibandingkan dengan tahun 2014** mengalami **kenaikan**. Untuk tahun 2014 tercapai 84.45 % atau dapat dilaksanakan dengan kriteria **Tinggi**, sedangkan tahun 2015 tercapai 92.60 % dengan kriteria **Sangat Baik**.

## **B. Analisis Capaian Kinerja**

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Adapun analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran pertama adalah Terasilitasinya Penyusunan Raperda,Raperda Inisatif serta Peraturan DPRD Prov. Jateng



Tabel III.B 1  
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Pertama

| No | Indikator                              | Capaian 2014 | 2015                                  |                             |             | Target akhir Renstra (2018) | Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%) |
|----|--|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
|    |  |              | Target PK                             | Realisasi                   | % Realisasi |                             |                                    |
| 1. | Prosentase Prolegda yang terselesaikan | 74 %         | 19 Perda, 2 Perat. DPRD, 28 Kep. DPRD | 10 Perda, 43 Keputusan DPRD | 73.68       | 100 %                       | 73.68 %                            |

Dalam dokumen rencana jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis prosentase prolegda yang terselesaikan ditargetkan pada Tahun kedua sebesar 100 %, sedangkan capaian Tahun 2015 adalah sebesar 73.68 % . Target akhir rencana strategis Tahun 2018 sebesar 100% capaian akhir Tahun 2015 terhadap capaian akhir RPJMD tahun 2018 prosentase prolegda yang terselesaikan sebesar 73.68 % terhadap gap akhir priode renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah merasa cukup yakin akan mampu mencapai target yang diharapkan. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 74 %, maka untuk Tahun 2015 capaian kinerja sebesar 73.68 % mengalami penurunan dapat dikategorikan kriteria sedang.

Capaian sasaran terfasilitasinya penyusunan raperda inisiatif dan pembahasan peraturan daerah oleh DPRD Tahun 2015 sebesar 73.68 % dengan penggunaan anggaran sebesar

Rp. 3.786.791.439 atau 34.70 % dari ( pagu anggaran Rp. 10.914.125.000) kondisi ini dikatakan efisien. Kondisi ini mampu mewujudkan produk hukum yang dihasilkan berupa 10 peraturan daerah, 43 keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 yang ditargetkan 19 raperda dan 2 peraturan DPRD dan 28 Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Permasalahannya adalah sebagian raperda tidak direalisasikan karena kendala aturan ( Raperda SOTK ) dan hasil Evaluasi Kemendagri yang melarang melakukan kunjungan studi banding keluar daerah. 9 raperda yang belum selesai tersebut diagendakan pada Tahun 2016. Solusi dari permasalahan tersebut adalah menyusun agenda kerja yang lebih cermat dan menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pimpinan DPRD dan alat kelengkapan Dewan.

Tabel III.B.2  
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kedua

| No | Indikator   | Capaian 2014 | 2015        |            |             | Target akhir Renstra (2018) | Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%) |
|----|---|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
|    |   |              | Target PK   | Realisasi  | % Realisasi |                             |                                    |
| 1. | Kapasitas hukum dimasyarakat, pengkajian dan penalaran peraturan Perundang-undangan | 92 %         | 10 kegiatan | 9 kegiatan | 90 %        | 100 %                       | 90 %                               |

Dalam dokumen rencana jangka menengah yang terdapat dalam rencana kapasitas hukum dimasyarakat, pengkajian dan penalaran peraturan Perundang-undangan yang terselesaikan ditargetkan pada Tahun kedua sebesar 100 %, sedangkan capaian Tahun 2015 adalah sebesar 90.00 % . Target akhir rencana strategis Tahun 2018 sebesar 100% capaian akhir Tahun 2015 terhadap capaian akhir RPJMD tahun 2018 pengkajian dan penalaran peraturan Perundang-undangan yang terselesaikan sebesar 90.00 % terhadap gap akhir priode renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah merasa cukup yakin akan mampu mencapai target yang diharapkan.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 92.00 %, maka untuk Tahun 2015 capaian kinerja sebesar 90.00 % mengalami penurunan dapat dikategorikan kriteria tinggi.

Capaian sasaran Terasilitasinya Kegiatan Penyiapan Pengkajian dan penelahaan peraturan Perundang Undangan oleh DPRD Tahun 2015 sebesar 90.00 % dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 833.268.900 atau 28.56 % dari ( pagu anggaran Rp. 2.917.943.000) kondisi ini dikatakan efisien.

Kondisi ini mampu mewujudkan produk hukum yang dihasilkan berupa 9 peraturan daerah yang ditargetkan 10 perda. Permasalahannya adalah terdapat beberapa anggota yang tidak mengikuti, karena berbenturan dengan kegiatan lain. 1 perda yang belum selesai tersebut diagendakan pada Tahun 2016. Solusi dari permasalahan tersebut adalah menyusun agenda kerja yang lebih cermat dan menjalin komunikasi dan koordinasi yang

lebih intensif dengan pimpinan DPRD dan alat kelengkapan Dewan.

Tabel III.B.3  
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Ketiga

| No | Indikator   | Capaian 2014 | 2015         |   |             | Target akhir Renstra (2018) | Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%) |
|----|---|--------------|--------------|---|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
|    |   |              | Target PK    | Realisasi   | % Realisasi |                             |                                    |
| 1. | Penyerapan aspirasi melalui Kunjungan Kerja DPRD di dalam dan Luar Provinsi Jawa Tengah | 70 %         | 134 kegiatan | 84 Kali Kunker Dalam Daerah, 6 Kali kunker luar daerah, 1 kali kunker luar negeri | 97 %        | 100 %                       | 97 %                               |

Dalam dokumen rencana jangka menengah yang terdapat dalam rencana Penyerapan aspirasi melalui Kunjungan Kerja DPRD di dalam dan Luar Provinsi Jawa Tengah yang terselesaikan ditargetkan pada Tahun kedua sebesar 100 %, sedangkan capaian Tahun 2015 adalah sebesar 97.00 % . Target akhir rencana strategis Tahun 2018 sebesar 100 % capaian akhir Tahun 2015 terhadap capaian akhir RPJMD tahun 2018 Kunjungan Kerja DPRD di dalam dan Luar Provinsi Jawa Tengah yang terselesaikan sebesar 97 % terhadap gap akhir priode renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah merasa cukup yakin akan mampu mencapai target yang diharapkan.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 70.00 %, maka untuk Tahun 2015 capaian kinerja sebesar 97.00 % mengalami kenaikan dapat dikategorikan kriteria sangat baik.

Capaian sasaran Kunjungan Kerja DPRD di dalam dan Luar Provinsi Jawa Tengah oleh DPRD Tahun 2015 sebesar 97.00 % dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 8.041.535.493 atau 54.93 % dari ( pagu anggaran Rp. 14.639.693.000) kondisi ini dikatakan efisien. Kondisi ini mampu mewujudkan 84 Kali Kunker Dalam Daerah, 6 Kali kunker luar daerah, 1 kali kunker luar negeri. Permasalahannya Kunjungan kerja ke luar provinsi baru dilaksanakan setelah anggaran perubahan disebabkan adanya evaluasi DPA oleh Kemendagri dan Kunjungan kerja ke luar negeri dilaksanakan 1 kali dan hanya dilaksanakan oleh Ketua DPRD. Solusi dari permasalahan tersebut adalah menyusun agenda kerja yang lebih cermat dan menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pimpinan DPRD dan alat kelengkapan Dewan.

**Tabel III.B.4**  
**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Keempat**

| No | Indikator   | Capaian 2014 | 2015       |            |             | Target akhir Renstra (2018) | Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%) |
|----|---|--------------|------------|------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
|    |   |              | Target PK  | Realisasi  | % Realisasi |                             |                                    |
| 1. | Terserapnya aspirasi Masyarakat atau Konstituen melalui Pelaksanaan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah |              | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 100 %       | 100 %                       | 100 %                              |

Dalam dokumen rencana jangka menengah yang terdapat dalam rencana Penyerapan aspirasi melalui Kunjungan Kerja DPRD di dalam dan Luar Provinsi Jawa Tengah yang terselesaikan ditargetkan pada Tahun kedua sebesar 100 %, sedangkan capaian Tahun 2015 adalah sebesar 100 % . Target akhir rencana strategis Tahun 2018 sebesar 100% capaian akhir Tahun 2015 terhadap capaian akhir RPJMD tahun 2018 Kunjungan Kerja DPRD di dalam dan Luar Provinsi Jawa Tengah yang terselesaikan sebesar 100 % terhadap gap akhir periode renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah merasa cukup yakin akan mampu mencapai target yang diharapkan.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100 %, maka untuk Tahun 2015 capaian kinerja sebesar 100.00 % mengalami kesamaan dapat dikategorikan kriteria sangat baik.

Capaian sasaran renes DPRD Provinsi Jawa Tengah oleh DPRD Tahun 2015 sebesar 100.00 % dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 12.410.969.280 atau 86.20 % dari ( pagu anggaran Rp. 14.397.992.000) kondisi ini dikatakan efisien. Kondisi ini mampu mewujudkan 3 kegiatan sesuai rencana.

Tabel III.B.5  
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kelima

| No | Indikator   | Capaian 2014 | 2015       |            |             | Target akhir Renstra (2018) | Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%) |
|----|---|--------------|------------|------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
|    |   |              | Target PK  | Realisasi  | % Realisasi |                             |                                    |
| 1. | Terinformasi masyarakat tentang Kebijakan dan Kinerja DPRD melalui Media Elektronik dan Media Cetak | 100 %        | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 100 %       | 100 %                       | 100 %                              |

Dalam dokumen rencana jangka menengah yang terdapat dalam rencana kegiatan Ekspose Interaktif Dewan Melalui Media Elektronik dan Media Cetak yang terselesaikan ditargetkan pada Tahun kedua sebesar 100 %, sedangkan capaian Tahun 2015 adalah sebesar 100.00 % . Target akhir rencana strategis Tahun 2018 sebesar 100% capaian akhir Tahun 2015 terhadap capaian akhir RPJMD tahun 2018 Ekspose Interaktif Dewan Melalui Media Elektronik dan Media Cetak yang terselesaikan sebesar 100 % terhadap gap akhir priode renstra Sekretariat DPRD

Provinsi Jawa Tengah merasa cukup yakin akan mampu mencapai target yang diharapkan.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 75.00 %, maka untuk Tahun 2015 capaian kinerja sebesar 100.00 % mengalami kenaikan dapat dikategorikan kriteria sangat baik.

Capaian sasaran kegiatan Ekspose Interaktif Dewan Melalui Media Elektronik dan Media Cetak oleh DPRD Tahun 2015 sebesar 100 % dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 138.000.000 atau 95.17 % dari ( pagu anggaran Rp. 145.000.000) kondisi ini dikatakan efisien. Kondisi ini mampu mewujudkan 4 kegiatan sesuai rencana.

Tabel III.B.6  
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Keenam

| No | Indikator  | Capaian 2014 | 2015   |                                |             | Target akhir Renstra (2018) | Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%) |
|----|--|--------------|--|--------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
|    |  |              | Target PK                                    | Realisasi                      | % Realisasi |                             |                                    |
| 1. | Penerbitan majalah mimbar legislatif dan perpustakaan online | 100 %        | 9 kali dan pengadaan warta legislatif online | 11 kali dan 3 warta legislatif | 100 %       | 100 %                       | 100 %                              |

Dalam dokumen rencana jangka menengah yang terdapat dalam rencana kegiatan Penerbitan majalah mimbar legislatif dan



perpustakaan online yang terselesaikan ditargetkan pada Tahun kedua sebesar 100 %, sedangkan capaian Tahun 2015 adalah sebesar 100 % . Target akhir rencana strategis Tahun 2018 sebesar 100% capaian akhir Tahun 2015 terhadap capaian akhir RPJMD tahun 2018 prosentase prolegda yang terselesaikan sebesar 100 % terhadap gap akhir priode renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah merasa cukup yakin akan mampu mencapai target yang diharapkan.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100 %, maka untuk Tahun 2015 capaian kinerja sebesar 100 % mengalami kesamaan dapat dikategorikan kriteria sangat baik.

Capaian sasaran kegiatan Ekspose Interaktif Dewan Melalui Media Elektronik dan Media Cetak oleh DPRD Tahun 2015 sebesar 100 % dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 516.119.000 atau 78.70 % dari ( pagu anggaran Rp. 655.836.000) kondisi ini dikatakan efisien. Kondisi ini mampu mewujudkan 4 kegiatan sesuai rencana.

Tabel III.B.7  
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Ketujuh

| No | Indikator                         | Capaian 2014 | 2015       |            |             | Target akhir Renstra (2018) | Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%) |
|----|-----------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
|    |                                   |              | Target PK  | Realisasi  | % Realisasi |                             |                                    |
| 1. | Seminar DPRD Provinsi Jawa Tengah | 80 %         | 5 kegiatan | 4 kegiatan | 80 %        | 100 %                       | 80 %                               |

Dalam dokumen rencana jangka menengah yang terdapat dalam rencana kegiatan seminar yang terselesaikan ditargetkan pada Tahun kedua sebesar 100 %, sedangkan capaian Tahun 2015 adalah sebesar 80.00 % . Target akhir rencana strategis Tahun 2018 sebesar 100%, capaian akhir Tahun 2015 terhadap capaian akhir RPJMD tahun 2018 seminar yang terselesaikan sebesar 80.00 % terhadap gap akhir priode renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah merasa cukup yakin akan mampu mencapai target yang diharapkan.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 80.00 %, maka untuk Tahun 2015 capaian kinerja sebesar 80.00 % mengalami kesamaan dapat dikategorikan kriteria tinggi.

Capaian sasaran kegiatan seminar oleh DPRD Tahun 2015 sebesar 80.00 % dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 187.534.240 atau 39.70 % dari ( pagu anggaran Rp. 472.425.000) kondisi ini dikatakan efisien. Kondisi ini mampu mewujudkan 4 kegiatan dari 5 kegiatan yang direncanakan disebabkan adanya 1 raperda inisiatif komisi E yaitu Perlindungan dan penempatan TKI akan dibahas ditahun 2016. Solusi dari permasalahan tersebut adalah menyusun agenda kerja yang lebih cermat dan menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pimpinan DPRD dan alat kelengkapan Dewan.

Tabel III.B.8  
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kedelapan

| No | Indikator                              | Capaian 2014 | 2015      |           |             | Target akhir Renstra (2018) | Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%) |
|----|--|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
|    |  |              | Target PK | Realisasi | % Realisasi |                             |                                    |
| 1. | Liputan Pimpinan, komisi dan kedewanan | 78 %         | 12 bulan  | 12 bulan  | 86 %        | 100 %                       | 86 %                               |

Dalam dokumen rencana jangka menengah yang terdapat dalam rencana kegiatan Liputan Pimpinan, komisi dan kedewanan yang terselesaikan ditargetkan pada Tahun kedua sebesar 100 %, sedangkan capaian Tahun 2015 adalah sebesar 86.00 % . Target akhir rencana strategis Tahun 2018 sebesar 100%, capaian akhir Tahun 2015 terhadap capaian akhir RPJMD tahun 2018 Liputan Pimpinan, komisi dan kedewanan yang terselesaikan sebesar 86.00 % terhadap gap akhir periode renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah merasa cukup yakin akan mampu mencapai target yang diharapkan.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 78.00 %, maka untuk Tahun 2015 capaian kinerja sebesar 86.00 % mengalami kenaikan dapat dikategorikan kriteria tinggi.

Capaian sasaran kegiatan Liputan Pimpinan, komisi dan kedewanan oleh DPRD Tahun 2015 sebesar 86.00 % dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 729.155.771 atau 58.20 % dari ( pagu anggaran Rp. 1.252.951.000) kondisi ini dikatakan

efisien. Kondisi ini disesuaikan dengan kegiatan dewan. Solusi dari permasalahan tersebut adalah menyusun agenda kerja yang lebih cermat dan menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pimpinan DPRD dan alat kelengkapan Dewan.

Tabel III.B.9  
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kesembilan

| No | Indikator                  | Capaian 2014 | 2015       |            |             | Target akhir Renstra (2018) | Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%) |
|----|----------------------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
|    |                            |              | Target PK  | Realisasi  | % Realisasi |                             |                                    |
| 1. | Sosialisasi dan Uji Publik | 60 %         | 6 kegiatan | 5 kegiatan | 85 %        | 100 %                       | 85 %                               |

Dalam dokumen rencana jangka menengah yang terdapat dalam rencana kegiatan Sosialisasi dan Uji Publik yang terselesaikan ditargetkan pada Tahun kedua sebesar 100 %, sedangkan capaian Tahun 2015 adalah sebesar 85.00 % . Target akhir rencana strategis Tahun 2018 sebesar 100%, capaian akhir Tahun 2015 terhadap capaian akhir RPJMD tahun 2018 yang terselesaikan sebesar 85 % terhadap gap akhir priode renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah merasa cukup yakin akan mampu mencapai target yang diharapkan.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 60.00 %, maka untuk Tahun 2015 capaian kinerja sebesar 85.00 % mengalami kenaikan dapat dikategorikan kriteria tinggi.

Capaian sasaran kegiatan seminar oleh DPRD Tahun 2015 sebesar 85.00 % dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 219.941.000 atau 28.39 % dari ( pagu anggaran Rp. 774.754.000) kondisi ini dikatakan efisien. Kondisi ini mampu mewujudkan 5 kegiatan dari 6 kegiatan yang direncanakan disebabkan adanya 1 uji publik raperda Perlindungan dan penempatan TKI belum dilaksanakan disosialisasikan akan dibahas ditahun 2016.

Solusi dari permasalahan tersebut adalah menyusun agenda kerja yang lebih cermat dan menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pimpinan DPRD dan alat kelengkapan Dewan.

### **C. Akuntabilitas Keuangan**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2015, didukung dengan Pendapatan Anggaran Setelah perubahan sebesar Rp. 1.100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.118.450.000,- ( 102 % ) , maka ada kelebihan Anggaran sebesar Rp. 18.450.000,- atau ( 2 % ). Anggaran APBD Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah setelah perubahan sebesar Rp. 112.636.197.000,- Sedangkan untuk realisasi APBD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 85.017.880.567,- (

75.48 % ) jadi sisa anggaran Rp. 27.618.316.433,- ( 24.52 % )  
 sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini:

Tabel III.C.1  
 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
 Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

| NO | BELANJA                            | ANGGARAN        | REALISASI       | %      | SISA           |
|----|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|----------------|
| A  | PENDAPATAN                         |                 |                 |        |                |
| 1  | Retribusi Daerah                   | 1.100.000.000,- | 1.118.450.000,- | 102.00 | 18.450.000,-   |
|    | Pendapatan 2015                    | 1.100.000.000,- | 1.118.450.000,- | 102.00 | 18.450.000,-   |
|    | Jumlah Tahun 2014                  | 865.000.000,-   | 865.275.000,-   | 100.03 | 275.000,-      |
| B. | BELANJA TDK LANGSUNG               | 22.295.214.000  | 21.780.361.360  | 97.69  | 514.852.640    |
| 1  | Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan | 22.295.214.000  | 21.780.361.360  | 97.69  | 514.852.640    |
| C. | BELANJA LANGSUNG                   | 90.340.983.000  | 63.237.519.207  | 70.00  | 27.103.463.793 |
|    | Jumlah B + C Thn 2015              | 112.636.197.000 | 85.017.880.567  | 75.48  | 27.618.316.433 |
|    | Jumlah Tahun 2014                  | 116.191.207.000 | 86.087.098.455  | 74.09  | 30.104.108.545 |

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

#### **a. Target dan Realisasi Pendapatan**

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran tahun 2015 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan setelah perubahan sebanyak Rp. 1.100.000.000,- namun ternyata pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 1.118.450.000,- ( 102 % ) ada kelebihan pendapatan sebesar Rp. 18.450.000,- ( 2 % ). Pendapatan anggaran tahun 2015, apabila dibandingkan tahun 2014 ada kenaikan. Apabila dilihat dari keseluruhan target pendapatan tahun 2015 terpenuhi, Namun apabila dilihat dari jumlah pendapatan dari retribusi wisma telah terpenuhi jumlah pengguna wisma di jalan Papandayan dan ada penurunan jumlah pengguna wisma di jalan Mentri Supeno dikarenakan kurang papan informasi atau petunjuk arah menuju lokasi penginapan dan kurangnya promosi untuk masyarakat umum. Melihat tabel diatas Anggaran Pendapatan Tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 maka dapat dikatakan bahwa Anggaran Pendapatan terdapat kenaikan.

Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada label berikut ini ;

Tabel III.C.2

**Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2015**

| NO | Jenis Pendapatan       | Target          | Realisasi     | Selisih/Pelamp<br>Anggaran | %      |
|----|------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------|
| 1  | 2                      | 3               | 4             | 5                          | 6      |
| 1  | Gedung Bank<br>Jateng  | 240.000.000,-   | 240.000.000   | 0                          | 100    |
| 2  | Kantin                 | 6.000.000,-     | 6.000.000     | 0                          | 100    |
| 3  | Wisma<br>Papandayan    | 272.625.000,-   | 342.350.000   | 69.725.000                 | 126    |
| 4  | Wisma Mentri<br>Supeno | 362.700.000,-   | 311.475.000   | (51.225.000)               | 86.00  |
| 5  | Wisma Guntur           | 218.625.000,-   | 218.625.000   | 0                          | 100    |
|    | Jumlah Tahun<br>2015   | 1.100.000.000,- | 1.118.450.000 | 18.450.000                 | 102    |
|    | Tahun 2014             | 865.000.000,-   | 865.275.000   | ( 275.000)                 | 100.03 |

**b. Target dan Realisasi Anggaran.**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 70 % dari total anggaran yang dialokasikan. Relisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 29.74 %, sedangkan realisasi untuk program/ kegiatan pendukung sebesar 40.26 % jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/ kegiatan disasaran Dialog Interaktif Pimpinan



Dewan, Anggota Dewan, Komisi, Fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui media massa (95.17%) realisasi fisik 100 % Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya kualitas sosialisasi dan uji publik (28.39 %) realisasi fisik 85 %. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2015 telah mencukupi . Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

**Tabel III.C.3**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung  
per Sasaran Tahun 2015**

| NO | Sasaran   | kinerja                               |                             |             | Anggaran       |               |             |
|----|---|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|
|    |   | Target                                | Realisasi                   | % Realisasi | Target         | Realisasi     | % realisasi |
| 1  | Terfasilitasinya Penyusunan Raperda Inisiatif Dan Pembahasan Peraturan Daerah Oleh DPRD | 19 Perda, 2 Perat. DPRD, 28 Kep. DPRD | 10 Perda, 43 Keputusan DPRD | 73.68       | 10.914.125.000 | 3.786.791.439 | 34.70       |

|           |   |  |  |        |                       |                       |              |
|-----------|---|--|--|--------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>2</b>  | Terfasilitasinya Kegiatan Penyiapan Pengkajian dan penelahaan peraturan Perundang Undangan                        | 10 pengkajian peraturan per-UU-an dan 1 pendidikan politik | 9 kali kegiatan  | 90,00  | <b>2.917.943.000</b>  | <b>833.268.900</b>    | <b>28.56</b> |
| <b>3</b>  | Terfasilitasi Koordinasi dan komunikasi, delegasi dan konsultasi serta kunjungan kerja DPRD Provinsi Jawa Tengah. | 134 kegiatan dalam 12 bulan                                | 84 Kali Kunker Dalam Daerah 6 Kali kunker luar daerah, 1 kali kunker luar negeri | 97,00  | <b>14.639.693.000</b> | <b>8.041.535.493</b>  | <b>54.93</b> |
| <b>4.</b> | Terfasilitasi Koordinasi dan komunikasi, kegiatan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah.                                | 3 kegiatan   | 3 kegiatan   | 100,00 | <b>14.397.992.000</b> | <b>12.410.969.280</b> | <b>86.20</b> |
| <b>5</b>  | Terfasilitasi Kualitas Kegiatan DPRD Ekspose Interaktif Dewan Melalui Media Elektronik dan Media Cetak            | 4 kegiatan   | 4 kegiatan   | 100,00 | <b>145.000.000</b>    | <b>138.000.000</b>    | <b>95.17</b> |

|  |   |   |                                |        |                        |                       |              |
|--|---|---|--------------------------------|--------|------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>6</b>   | Terfasilitasinya informasi Dengan Stakeholder dalam penerbitan majalah mimbar | 9 kali dan pengadaan warta legislatif On Line | 11 kali dan 3 warta legislatif | 100,00 | <b>655.836.000</b>     | <b>516.119.000</b>    | <b>78.70</b> |
| <b>7</b>   | Terfasilitasi kegiatan Seminar DPRD Provinsi Jawa Tengah                      | 5 kali kegiatan                               | 5 kali kegiatan                | 80,00  | <b>472.425.000</b>     | <b>187.534.240</b>    | <b>39.70</b> |
| <b>8</b>   | Terfasilitasinya liputan Pimpinan, Komisi dan Kedewanan                       | 12 bulan                                      | 12 bulan                       | 86,00  | <b>1.252.951.000</b>   | <b>729.155.771</b>    | <b>58.20</b> |
| <b>9</b>   | Terfasilitasi kegiatan sosialisasi dan uji publik                             | 6 kali kegiatan                               | 6 kali kegiatan                | 85,00  | <b>774.754.000</b>     | <b>219.941.000</b>    | <b>28.39</b> |
| <b>Jumlah Belanja langsung program utama</b>     |   |   |                                |        | <b>46.170.719.000</b>  | <b>26.863.315.123</b> |              |
| <b>Jumlah Belanja langsung program pendukung</b> |   |   |                                |        | <b>44.170.264.000</b>  | <b>36.374.204.084</b> |              |
| <b>Total belanja langsung</b>                    |   |   |                                |        | <b>90.340.983.000</b>  | <b>63.237.519.207</b> | <b>70.00</b> |
| <b>Total belanja tidak langsung</b>              |   |   |                                |        | <b>22.295.214.000</b>  | <b>21.780.361.360</b> | <b>97.69</b> |
| <b>Jumlah Anggaran Belanja</b>                   |   |   |                                |        | <b>112.636.197.000</b> | <b>85.017.880.567</b> | <b>75.48</b> |

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran tahun 2015 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah ditargetkan anggaran setelah perubahan sebanyak Rp. 112.636.197.000,- namun realisasi pengeluaran sebesar Rp. 85.017.880.567,- ( 75.48 % ) maka sisa anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 27.618.316.433,- ( 24.52 % ).

Pengeluaran untuk pogram Utama yaitu

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk 9 kegiatan realisasi anggaran sebesar : Rp. 26.863.315.123,- ( 58.18 % ), nilai capaian 91.36 % dengan kategori Sangat Baik.

Pengeluaran untuk program Pendukung sebesar Rp. 36.374.204.084,- terdiri dari 4 Program yaitu :

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 15 kegiatan, realisasi anggaran sebesar Rp. 17.849.746.214,- ( 89.96 % ), nilai capaian 100 % dengan kategori Sangat Baik.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.468.750.000,- ( 77.79 % ), nilai capaian 100 % dengan kategori Sangat baik.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 11 kegiatan, realisasi anggaran sebesar Rp. 15.908.598.970,- ( 75.22 % ), nilai capaian 87.23 % dengan kategori Tinggi.
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.147.108.900,- ( 88.75 % ), nilai capaian 100 % dengan kategori Sangat baik.

Dari 5 Program terdiri dari 37 kegiatan dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 63.237.519.207,- ( 70.00 % ) nilai capaian 92.60 % dengan kategori **Sangat baik**.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan kinerja instansi pemerintah sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah ini disusun berdasarkan kebijakan umum anggaran (KUA) tahun anggaran 2015, serta penetapan kinerja tahun 2015 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) serta memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jbaran dari visi ,misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran. Ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 5 indikator terdiri dari 1 indikator utama yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari 9 kegiatan dan 4 indikator pendukung yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 15 kegiatan, Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 11 kegiatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan, Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan.

Penyelenggaraan kegiatan di sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2015 merupakan tahun ke 2 dari rencana strategis sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.
2. Dari analisa 5 sasaran, terdapat 1 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolah ukur yang telah memenuhi target sebesar 90.19 % yaitu . 4 indikator kinerja pembantu yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100 % . Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **SANGAT BAIK**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :
  - b. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran ( PPS ) dicapai 92.60 % dengan rincian per sasaran :
    1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Capaian Kinerja 90.19 % dengan kategori Tinggi.

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Capaian Kinerja 100 % dengan kategori Sangat Baik.
  3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Capaian Kinerja 100 % dengan kategori Sangat Baik.
  4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Capaian Kinerja 100 % dengan kategori Sangat Baik.
  5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Capaian Kinerja 100 % dengan kategori sangat Baik.
- c. Rencana Pendapatan Tahun 2015 RP. 1.100.000.000,-  
Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 1.118.450.000,- (102 % ) ada kelebihan Anggaran Pendapatan Sebesar Rp. 18.450.000,- ( 2 % ) .
- d. Pelaksanaan APBD Tahun 2015.  
Dari keseluruhan anggaran dan realisasi belanja setelah perubahan untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 sebesar :
- |                        |                             |            |
|------------------------|-----------------------------|------------|
| Anggaran Tahun 2015    | Rp. 112.636.197.000,-       | (100.00 %) |
| Realisasi Belanja 2015 | <u>Rp. 85.017.880.567,-</u> | ( 75.48 %) |
| Sisa Anggaran 2015     | Rp. 27.618.316.433,-        | ( 24.52 %) |
- Hal ini berarti terjadi efisiensi dari Anggaran yang disediakan.

## **B. Saran**

Laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2015 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan kebijakan yang diperlukan.

Langkah- langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan- permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah dirumuskan saran – saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya- upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang sistem kinerja pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen - dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
2. Perlu adanya pemerintahan yang memadai dengan penerapan SAKIP di instansi pemerintah sehingga tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian perjanjian kinerja (PK)
3. Perlu meningkatkan Disiplin SDM di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Rakor – Rakor sebagai upaya Evaluasi Kinerja serta Mengirimkan Staf dalam Upaya Peningkatan SDM.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Semarang, Januari 2016.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. IGN INDRA SURYA, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP : 19591006 1988503 1 007